

**PENGARUH FAKTOR KOMUNIKASI, FAKTOR SUMBER DAYA,
FAKTOR DISPOSISI TERHADAP KEBERHASILAN IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA
KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FIS UNP Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**NOVIA ELVA LENI
NIM.1201591/2012**

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

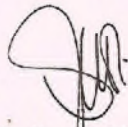
Judul : Pengaruh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya,
dan Faktor Disposisi Terhadap Keberhasilan
Implementasi Kebijakan Tentang Pedagang Kaki
Lima Kota Payakumbuh

Nama : Novia Elva Leni
NIM : 1201591
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Januari 2016

Disetujui Oleh:

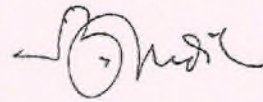
Pembimbing I



Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D

NIP. 196304011989031003

Pembimbing II



Adil Mubarak, S.IP, M.Si

NIP. 19790108200912003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa, 5 Januari 2016 pukul 08.30 s/d 10.00 WIB

Pengaruh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, dan Faktor Disposisi Terhadap Keberhasilan
Implementasi Kebijakan Tentang Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh

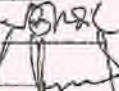
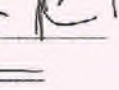
Nama : Novia Elva Leni
NIM : 1201591
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 5 Januari 2016

Tim Penguji

Nama
Ketua : Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Sekretaris : Adil Mubarak, S.IP, M.Si
Anggota : Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
Anggota : Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D
Anggota : Nora Eka Putri, S.IP, M.Si

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

PERSEMBAHAN

Ucapan terima kasih yang terletak di halaman awal ini justru dibuat paling akhir. Ya, pada akhirnya hanya rasa syukurilah yang menjadi bentuk paling kokoh bagi segala bentuk keseimbangan dari sebuah pencapaian. Bahwa semua hal yang terjadi dalam hidup ini tidak terjadi begitu saja, tidak juga karena kita saja. Sebab syukur adalah menerima dengan segala kerendahan hati

'Nel



Tidak kalimat yang paling menenangkan hati dan pikiran kecuali Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Syukur padaMu yang telah menggariskan jalan hidup dan memudahkan urusanku. Aku percaya tidak lain yang bisa membantuku sampai pada titik ini, kecuali kehendak-Mu.

Skripsi ini ku persembahkan kepada

Kedua orang tuaku yang telah memberikan separuh hidup mereka untuk hidupku. Untuk Apa yang telah bekerja keras menghidupi kami hingga tak punya waktu untuk dirinya sendiri. Pergi pagi pulang malam, hampir tak ada tanggal merah baginya. Untuk Ama yang tak kenal lelah menyiapkan kebutuhan kami setiap hari hingga sering lupa dengan apa yang dirinya sendiri butuhkan. Ketika perjuangan kami tak menemui hasil Ama selalu jadi tempat ternyaman untuk melepaskan segala kelelahan dan keresahan. Untuk Uda yang pandai, mitra terbaik bagiku dan selalu menjadi tempat bertanya bagi kami.

Aku bersyukur ditakdirkan hidup di keluarga kecil ini. Sampai pada waktunya dan aku yakin itu tak akan lama lagi, aku lah yang akan menggantikan semua peran itu. Agar Apa punya waktu untuk dirinya sendiri. Ama tak akan lagi lupa dengan apa yang dia sendiri butuhkan, dan Uda akan tetap menjadi mitra terbaik bagiku. Dari merekalah aku menemukan cinta yang begitu tulus.

Sampai pada titik ini tidak terlepas dari dukungan banyak orang.

Terima kasih kepada

Dosen pembimbing akademisku yang merangkap menjadi pembimbing I, Bapak Drs.Syamsir, M.Si, Ph.D. Beliau sudah seperti ayah, teman dan malikat bagi kami, semua momen-rekan IAN pasti merasakan hal sama. Badi baik dan jaya-jayanya tak akan pernah dilupakan.

Dosen pembimbing II ku, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si, dosen yang tak kalah baik hati.

Para dosen penguji, Bapak Drs. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D yang penuh pertimbangan, Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D yang keibuan, tepat waktu dan sangat teliti, Ibu Nora Eka Putri, S.IP, M.Si, kakakku, hampungku yang sopel dan easy going.

Semua dosen yang pernah bekerja sama denganku. Bapak Prof. Darmen Lanin, Ph.D, Bapak Drs. Yusril Yunus, M.Si, Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D, Bapak Aldri Frinakh, S.H, M.Hum, Ph.D, Bapak Hasbullah Malau, S.Sos, M.Si. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk belajar dan mendapat pengalaman dari berbagai daerah.

Terima kasih Bapak Drs. Karjuni Dt.Maani, M.Si yang ramah dan sangat menyenangkan, Ibu Dra.Juniati, M.Si dan Bapak Drs. Dasril, M.Ag yang selalu memberi nasehat, Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA yang selalu memberi semangat. Terima kasih kepada para dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang tidak hanya telah memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman tapi juga nasehat dan motivasinya. Terima kasih kepada staf administrasi jurusan IAN Kak Puja dan Uni Sil yang selalu membantu dan minta bantuan.

Terima kasih kepada rekan-rekan jurusan IAN BP 2012. Chikan yang baik hati dan Gita yang penuh canda, kawan pertama dan selamanya. Wivik yang pendiam tapi selalu ada. Rima dan Sukma yang selalu berdua dan menjadikan aku orang ketiga. Ine partner magang terbaik. Aina, Linda, dan semua yang selalu meminjam motor. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Terima kasih juga kepada senior dan junior jurusan IAN pernah bekerja sama denganku. Terima kasih kepada keluarga besar di UKKPK.

Terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang tidak sempat aku sebutkan atau sebutkan di sini.

Saat angan begitu jauh tinggalkan waktu, aku akan berpegang pada doa. Hingga tiada jalan yang buatku kecewa, kecuali
KehendakNya
'Nel



Salam Sukses

Novia Elva Leni
'Nel

SURAT PERNYATAAN TIDAK DIPLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Novia Elva Leni

NIM : 1201591/2012

Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 25 November 2015

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Pengaruh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh adalah benar bahwa merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



NOVIA ELVA LENI

NIM.1201591/2012

ABSTRAK

NOVIA ELVA LENI : NIM 2012/1201591 Pengaruh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Tentang Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tentang pedagang kaki lima Kota Payakumbuh. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena masih adanya pedagang kaki lima yang tidak mengetahui dan memahami kebijakan tentang pedagang kaki lima, sumber daya pelaksanaan kebijakan yang tidak dipelihara, serta sikap yang kurang baik dari aparat pelaksana.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Payakumbuh. Pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin dan teknik *Proporsional Random Sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket dengan skala pengukuran skala likert dan didukung dengan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika diuji secara bersama-sama kekuatan variabel faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor disposisi dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 83%. Sedangkan, jika di uji secara sendiri-sendiri diketahui kekuatan variabel faktor komunikasi dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 75%. Kekuatan variabel faktor sumber daya dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 69.7%. Kekuatan variabel faktor disposisi dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 81.5%.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT Rabb semesta alam, karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pengaruh Faktor Komunikasi, Faktor Sumber Daya, Faktor Disposisi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan Tentang Padagang Kaki Lima Kota Payakumbuh”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahanda Hafnelson Ilyas dan Ibunda Erdawati tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini. Dan kepada kakanda tercinta Hafis Prima Andhika, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka. Selajutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Dosen Penasehat Akademik dan pembimbing I penulis, selajutnya ucapan terimakasih kepada Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D, Ibu Dra.Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D dan Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M.Si terima kasih telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. Syamsir, M.Si. Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibuk Dosen staf pengajar pada jurusan Jurusan Ilmu Sosial Politik khususnya Bapak dan Ibuk dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf administrasi Jurusan Ilmu Sosial Politik dan staf administrasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis cintai dan sayangi.
6. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terimah kasih untuk ide-ide dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Padang, Januari 2015

Novia Elva Leni

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Konsep Kebijakan Publik	11
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik	22
C. Konsep Pedagang Kaki Lima	29
D. Penelitian yang Relevan	31
E. Kerangka Konseptual	32
F. Hipotesis	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Variabel Penelitian	35
D. Populasi dan Sampel Penelitian	36
E. Defenisi Operasional	39
F. Jenis, Teknik dan Alata Pengumpulan Data	41
G. Instrumen Penelitian	42

H. Validitas dan Reliabilitas	44
I. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	53
B. Temuan Khusus	62
C. Pembahasan	102
D. Keterbatasan Penelitian	110
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh Tahun 2013	37
Tabel 3.2 Pengukuran Variabel	43
Table 3.3 Operasionalisasi Variabel	44
Tabel 3.4 Uji Validitas	45
Tabel 3.5 Uji Realibilitas	47
Tabel 4.1 Profil Responden Menurut Klasifikasi Umur	57
Tabel 4.2 Profil Responden Menurut Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3 Profil Responden Menurut Status Perkawinan	58
Tabel 4.4 Profil Responden Menurut Jumlah Tanggungan	59
Tabel 4.5 Profil Responden Menurut Pendidikan Terakhir	60
Tabel 4.6 Profil Responden Menurut Lama Jadi PKL	61
Tabel 4.7 Profil Responden Menurut Pendapatan Bersih per Hari	62
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Faktor Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh	63
Tabel 4.9 Deskripsi Variabel Faktor Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh	66
Tabel 4.10 Deskripsi Variabel Faktor Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh	69
Tabel 4.11 Deskripsi Variabel Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pedagang Kaki Lima Kota Payakumbuh	72
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi Data Penelitian	78
Tabel 4.13 Hasil Uji Multikoloniaritas Data Penelitian	79
Tabel 4.14 Hasil Uji Regresi untuk pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh ...	80
Tabel 4.15 Hasil Uji Autokorelasi Data Penelitian	86
Tabel 4.16 Hasil Uji Regresi untuk pengaruh faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang	

kaki lima Kota Payakumbuh	87
Tabel 4.17 Hasil Uji Autokorelasi Data Penelitian	93
Tabel 4.18 Hasil Uji Regresi untuk pengaruh faktor sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh	94
Tabel 4.19 Hasil Uji Autokorelasi Data Penelitian	99
Tabel 4.20 Hasil Uji Regresi untuk pengaruh faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan	17
Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton	18
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian	75
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedatisitas Bagi Variabel Bebas	76
Gambar 4.3 Hasil Uji Linearitas Data Penelitian	77
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian	83
Gambar 4.5 Hasil Uji Heteroskedatisitas Bagi Variabel Bebas	84
Gambar 4.6 Hasil Uji Linearitas Data Penelitian	85
Gambar 4.7 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian	90
Gambar 4.8 Hasil Uji Heteroskedatisitas Bagi Variabel Bebas	91
Gambar 4.9 Hasil Uji Linearitas Data Penelitian	92
Gambar 4.10 Hasil Uji Normalitas Data Penelitian	96
Gambar 4.11 Hasil Uji Heteroskedatisitas Bagi Variabel Bebas	97
Gambar 4.12 Hasil Uji Linearitas Data Penelitian	98

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Angket	119
Lampiran 2 Syntax	122
Lampiran 4 Surat Tugas	124
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian.....	125
Lampiran 6 Perda Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik merupakan instrumen bagi pemerintah untuk memecahkan berbagai masalah publik. Berangkat dari isu, masalah-masalah publik yang terpilih diagendakan untuk kemudian akan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Adapun salah satu tujuan dibentuknya kebijakan publik menurut Erwan dan Dyah (2012:64) adalah untuk memecahkan masalah publik. Kebijakan publik (*public policy*) meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik) (Magill dalam Edi, 2012:10).

Salah satu kebijakan publik yang menjadi perhatian dewasa ini adalah peraturan mengenai pedagang kaki lima. Di Indonesia, memang belum ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai PKL. Penataan dan pemberdayaan PKL diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan peraturan-peraturan lainnya, seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota/Bupati.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang banyak dijumpai di kota-kota besar. Sektor informal adalah alternatif bagi masyarakat yang tidak diterima bekerja di sektor formal terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai kemampuan serta keahlian yang memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal

dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian” (www.kamusbesar.com, 2015).

PKL tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kota sebagai pusat perekonomian menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mencari mata pencaharian. Oleh karena itu, masyarakat beramai-ramai datang ke kota dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun tingginya arus urbanisasi yang tidak disertai dengan perluasan lapangan pekerjaan membuat penduduk desa yang pindah ke kota mencari alternatif lain untuk tetap bertahan hidup di kota, salah satunya adalah memilih untuk berprofesi sebagai PKL.

Di kota-kota besar, berbagai masalah menyertai perkembangan PKL. Masalah-masalah tersebut berupa penggunaan badan jalan dan trotoar oleh PKL yang dapat mengganggu ketertiban umum dan merusak keindahan kota. Selain itu, keberadaan PKL yang tidak dikelola dengan baik juga dapat menimbulkan kemacetan dan masalah lingkungan seperti sampah. Dalam penelitiannya mengenai PKL, Syamsir (2009) mengatakan profesi atau pekerjaan sebagai pedagang kaki lima memang sangat dilematis.

“Di satu sisi menjadi pedagang kaki lima merupakan usaha untuk menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di sisi lain sebagai aktifitas usaha yang menggunakan ruang publik, pedagang kaki lima seringkali harus berhadapan dengan peraturan daerah setempat yang pada umumnya melarang orang berjualan di tempat-tempat yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum, seperti trotoar dan badan jalan. Sehingga penyitaan dalam operasi penertiban yang dilakukan oleh petugas merupakan sesuatu yang sangat ditakuti tapi tidak bisa dihindari oleh pedagang kaki lima”.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL sebagai bagian sektor usaha informal berperan dalam mendorong perekonomian masyarakat. PKL memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Oleh karena itu, apabila dikelola dengan baik, melalui pembayaran retribusi daerah PKL berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kota Payakumbuh terletak di jalur transportasi yang menghubungkan Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Sebagai kota yang letaknya strategis, Payakumbuh memiliki potensi yang cukup besar bagi tumbuh dan berkembangnya PKL. Di kota ini, keberadaan PKL tersebut mendapat reaksi positif dari pemerintah daerah setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan yang mengatur khusus tentang PKL, yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Malam. Hasil temuan penelitian Wahyu (2010) menyatakan Pemerintah Kota Payakumbuh lebih baik dari Pemerintah Kota Padang dalam hal membentuk regulasi mengenai penataan dan pembinaan PKL. Pemkot Payakumbuh sudah mulai mengatur PKL tidak hanya berdasarkan perda ketertiban dan keamanan tetapi juga dengan perda khusus yang mengatur PKL.

Pemerintah Kota Payakumbuh sejak tahun 2010 telah mulai melakukan berbagai upaya penataan, pembinaan, dan penertiban PKL, baik melalui Peraturan Daerah Ketertiban dan Keamanan dan juga melalui Peraturan Daerah khusus. Di antara Perda tersebut adalah Perda Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penetapan Kawasan Pasar, Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang

K5/Pedagang Malam, Perda Nomor 19 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 20 tahun 2011 Tentang Jasa Umum.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, menjelaskan, Kota Payakumbuh terdapat 3 pasar yaitu, pasar pertokoan Kota Payakumbuh, pusat pertokoan Terminal sago dan pasar Ibu. Sedangkan pedagang kaki lima di pasar Pusat Payakumbuh berjumlah 676 orang dan di 1.625 orang di pasar Ibu. Jadi total keseluruhan PKL di Payakumbuh adalah sebanyak 2301 orang (www.dprdpayakumbuh.wordpress.com, diakses tanggal 29 Januari 2015).

Pada dasarnya Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam bertujuan sebagai berikut:

1. Pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima dan /atau Pedagang Malam;
2. Menciptakan keterpaduan, keserasian dan keindahan Kota;
3. Menciptakan higienis dan sanitasi lingkungan bagi Pedagang Kaki Lima dan /atau Pedagang Malam.

Meskipun demikian kenyataan di lapangan, masih ditemukan kesemrawutan PKL di Payakumbuh. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Riza Fahlepi, Wali Kota Payakumbuh (www.padangtoday.com, diakses 17 Maret 2015),

“Sudah seharusnya pasar Payakumbuh ditata ulang ke tempat yang lebih representatif. Karena dilihat secara fisik, parkir yang semrawut, bangunan pasar banyak yang telah rusak dimakan usia, penataan tempat berjualan bagi PKL belum optimal, untuk itu perlu dilakukan perelokasian PKL ke lokasi yang lebih refresentatif melalui tim yang telah dibentuk”.

Oleh karena itu, tujuan yang diharapkan dengan dibentuknya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Malam belum tercapai secara maksimal.

Senada dengan itu berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang mainan anak dan pedagang q-tela pada 20 Februari 2015 maka dapat diketahui bahwa kedua pedagang tersebut tidak mengetahui adanya Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang pedagang kaki lima dan merasakan sikap negatif dari aparat.

“Kami tidak tahu adanya perda tersebut. Sepertinya tidak ada sosialisasi. Kalau sikap aparat menurut kami, sikap aparat kurang baik kadang-kadang kalau memungut retribusi atau satpol pp yang menggusur pedagang terlihat sekali mereka bersikap arogan”.

Senada dengan itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang martabak pada 21 Februari 2015, meskipun telah ada peraturan khusus yang mengatur tentang PKL, pasar kota Payakumbuh belum tertata maksimal. Menurut keterangannya, masih ditemukan PKL yang berdagang di luar tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, seperti di trotoar dan badan jalan. Lebih lanjut ia mengatakan, PKL yang berdagang di luar tempat yang ditentukan tersebut sebagian besar telah mendapat izin dari oknum-oknum tertentu.

Selain itu, di lapangan juga ditemukan adanya PKL yang berdagang tanpa memperhatikan kondisi lingkungan, misalnya dengan membangun bangunan permanen secara liar dan juga tidak membersihkan limbah hasil dagang mereka dengan baik, sehingga saluran air yang ada tersumbat oleh sampah yang menjadi penyebab timbulnya genangan air di sekitar pasar. Hal ini menjadikan kondisi yang bersih, tertib, dan indah seperti yang diharapkan oleh Pemda melalui Perda Nomor 9 Tahun 2010 belum tercapai.

Dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan sebuah proses yang kompleks dan rumit. Persoalan implementasi memang tidak semudah yang dibayangkan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan (Erwan dan Dyah, 2012:12). Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah kebijakan, Edward III mengatakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, 4) struktur birokrasi.

Pada faktor komunikasi ditemukan masalah belum tercapainya dengan maksimal tujuan dari Perda Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 karena komunikasi yang kurang efektif antara aparat pelaksana dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah PKL. Sebagaimana disampaikan oleh pedagang yang diwawancara pada 21-22 Februari 2015. Banyaknya PKL tidak mengetahui adanya Perda Nomor 9 Tahun 2010 diduga karena komunikasi yang kurang efektif dari aparat pelaksana, misalnya sosialisasi Perda tersebut. Begitu juga dengan faktor sumber daya dan disposisi dalam hal ini adalah sumber daya manusia. Aparat pelaksana dinilai tidak memberikan sikap positif khususnya pada PKL.

Terkait dengan Perda Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Salah satunya seperti yang telah dipaparkan di atas adalah aparat yang tidak memberikan sikap positif kepada PKL dan kurangnya komunikasi antara aparat dengan PKL dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan PKL Kota Payakumbuh menggunakan teori Edward III. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tentang pedagang kaki lima Kota Payakumbuh”.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pedagang kaki lima mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima.
2. Adanya penggunaan lokasi oleh PKL di luar yang telah ditentukan Pemerintah Daerah.
3. Kurangnya komunikasi dari aparat pelaksana dengan PKL mengenai Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima.
4. Kurangnya sosialisasi sebagai bagian komunikasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima oleh aparat pelaksana .
5. Kurangnya kesadaran PKL terhadap kebersihan lingkungan.
6. Adanya PKL konflik horizontal antara sesama PKL dan PKL dengan masyarakat umum.
7. Kurangnya kemampuan dan netralitas aparat terhadap pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2010.
8. Belum optimalnya penataan PKL kota Payakumbuh.
9. Masih terjadinya kesemrawutan akibat belum tertatanya PKL.

C. Batasan Masalah

Mengingat cukup luasnya permasalahan dan sangat kompleksnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2010, dan juga karena keterbatasan tenaga, dana serta waktu saat penelitian maka penelitian ini tidak mengungkap seluruh aspek yang telah dijabarkan tadi. Adapun batasan masalah yang diteliti adalah pengaruh faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

D. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini peneliti perlu membuat rumusan masalah yang diteliti, ini dilakukan agar tidak sampai ada pembahasan yang berbelit, maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor disposisi secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan faktor sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh?

4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan sudah barang tentu ada tujuannya, adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor disposisi secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh
2. Untuk mengetahui pengaruh faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.
3. Untuk mengetahui pengaruh faktor sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.
4. Untuk mengetahui pengaruh faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Administrasi Negara, khususnya Kebijakan Publik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, sebagai masukan dalam menentukan kebijakan PKL yang akan datang.
2. Bagi peneliti, secara akademis dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan peneliti dalam menganalisa permasalahan yang terjadi dan sekaligus membandingkan dengan teori yang telah dipelajari selama ini di bangku perkuliahan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Kebijakan Publik

Konsep kebijakan banyak ditemui ketika sebuah organisasi baik itu organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta memerlukan alternatif dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Kebijakan didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu (Carl Friedrich dalam Dwiyanto, 2009:18). Berbeda dengan Carl Friedrich, Hogwood dan Gunn (dalam Parson, 2008:15) menyatakan bahwa terdapat sepuluh istilah kebijakan dalam pengertian modern yaitu:

1. sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas;
2. sebagai ekspresi tujuan umum atas aktivitas negara yang diharapkan,
3. sebagai proposal spesifik,
4. sebagai keputusan pemerintah,
5. sebagai otorisasi formal,
6. sebagai sebuah program,
7. sebagai output,
8. sebagai “hasil” (outcome),
9. sebagai teori dan model,
10. sebagai sebuah proses.

Dalam beberapa literatur terminologi kebijakan seringkali disamakan dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan (*policy*) menurut Anderson (dalam Solihin, 2005:3) diartikan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Hal senada juga diungkapkan oleh Amara (dalam M.Irfan, 2009:17-18), kebijaksanaan diartikan sebagai suatu taktik dan

strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijaksanaan memuat 3 (tiga) elemen yaitu: 1) identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; 2) taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; 3) penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Jika diperbandingkan pengertian kebijakan dengan kebijaksanaan yang telah dipaparkan di atas, jelas terlihat bahwa kebijakan mempunyai arti yang hampir sama dengan kebijaksanaan, yaitu sebuah langkah atau tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang untuk memecahkan masalah. M.Irfan dan Solihin di dalam bukunya bahkan menyebut istilah kebijakan dengan kata kebijaksanaan. Berbeda dengan dua ahli sebelumnya, Edi (2012:7) mengatakan istilah kebijakan dan kebijaksanaan mempunyai perbedaan arti. Istilah kebijakan dari kata Inggris "*policy*" yang dibedakan dengan kata kebijaksanaan (*wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Kebijaksanaan (*wisdom*) adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahannya atau masyarakat. Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.

Sementara itu, publik sering diartikan sebagai masyarakat, umum, sekelompok orang, kumpulan individu dan/atau orang banyak. Istilah publik berasal dari bahasa Inggris "*Public*" berarti umum, masyarakat atau negara. Arti *public* itu sendiri adalah sebagai berikut: sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki (Inu, 2006:17).

Hal senada juga dijelaskan dalam Ensiklopedi Administrasi (dalam Wirman, 2012:15), publik adalah sejumlah orang (yang tidak mesti berada dalam suatu tempat) yang dipersatukan oleh kepentingan yang sama, yang berbeda dengan kelompok lain. Defenisi serupa juga diungkapkan oleh Scott dan Allen (dalam Wirman, 2012:15), publik adalah kelompok individu yang terikat oleh kepentingan dan berbagi rasa atas dasar kebersamaan. Publik sering dikonsepsikan sebagai sebuah ruang yang berisi dengan aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama (Kristian, 2006:26-27).

Istilah yang lazim dipakai sebagai sandingan publik (Parson, 2008:3) adalah:

1. kepentingan publik (*public interest*),
2. opini publik (*public opinion*),
3. barang-barang publik (*public goods*),
4. hukum publik (*public law*),
5. sektor publik (*public sector*),
6. kesehatan publik (*public health*),
7. transportasi publik (*public transport*),
8. pendidikan publik (*public education*),
9. siaran layanan publik (*public service broad-casting*),
10. akuntabilitas publik (*public accountability*),
11. toilet publik (*public toilets*),
12. ketertiban umum (*public order*),
13. utang publik (*public debt*).

Selanjutnya, konsep kebijakan publik sering dipahami sebagai upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah publik. Akan tetapi, kebijakan publik erat kaitannya sebagai produk politik. Kebijakan publik pada dasarnya memiliki tahapan yang sangat panjang, mulai dari formulasi, implementasi hingga evaluasi. Sehingga dalam proses kebijakan publik tidak dipungkiri lagi akan melibatkan banyak aktor dan *stakeholder* yang memiliki beragam kepentingan.

Thomas Dye (dalam Dwiyanto, 2009:17) menyatakan kebijakan publik *adalah whatever governments choose to do or not to do*. Maknanya Thomas Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jadi, kebijakan publik menurut Thomas Dye adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan publik (*public policy*) meliputi semua kebijakan yang berasal dari pemerintah, seperti kebijakan ekonomi, transportasi, komunikasi, pertahanan keamanan (militer), serta fasilitas-fasilitas umum lainnya (air bersih, listrik) (Magill dalam Edi, 2012:10).

Menurut Leslie A. Pal dalam Joko (2010:11) kebijakan publik yaitu “*What government actually do and why* (Richard Semeon), *Action taken by government* (Ira Sharkansky). Hal serupa juga dinyatakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Sri, 2008:9) bahwa kebijakan publik merupakan apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Adapun konsep kunci kebijakan publik menurut Young dan Quinn (dalam Edi, 2012:44) sebagai berikut:

1. tindakan pemerintah yang berwenang,
2. sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata,
3. seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan,
4. sebuah keputusan yang berorientasi pada tujuan,
5. sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu,
6. sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor.

. Sementara itu, Chief J.O Udoji (dalam Solihin, 2005:5), mendefenisikan kebijaksanaan negara sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu

tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Implikasi dari pengertian kebijaksanaan negara tersebut menurut Anderson (dalam M.Irfan, 2009:19), adalah:

- (1) bahwa kebijaksanaan negara itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijaksanaan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijaksanaan itu adalah apa yang benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijaksanaan negara bisa bersifat positif dalam arti: merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti: merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) bahwa kebijaksanaan pemerintah didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan-peraturan perundangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Secara sederhana kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga (Riant, 2006:31), yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang/Peraturan Permerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut Bridgman dan Glyn Davis (dalam Ismail, 2009:8) adalah banyaknya defenisi kebijakan publik menjadikan kita sulit untuk menentukan secara tepat sebuah defenisi kebijakan publik. Oleh karena itu, untuk

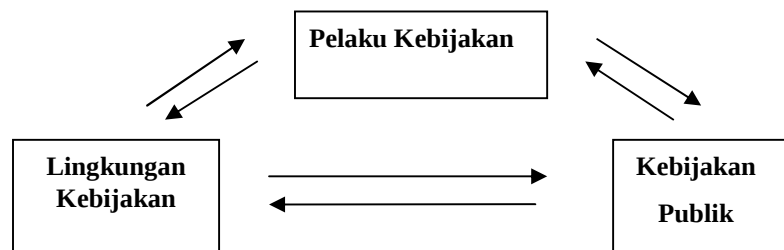
memudahkan pemahaman kita terhadap kebijakan publik kita dapat meninjaunya dari lima karakteristik kebijakan publik yaitu: (1) memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami, (2) melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya, (3) terstruktur dan tersusun menurut peraturan tertentu, (4) pada hakikatnya adalah politis, (5) bersifat dinamis.

Dari beberapa defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memecahkan masalah publik. Dari poin-poin di atas, maka kita bisa menarik benang merah dari definisi kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini, kebijakan publik adalah “keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak”. Dalam Peraturan Menteri tersebut, kebijakan publik mempunyai 2 (dua) bentuk yaitu peraturan yang terkodifikasi secara formal dan legal, dan pernyataan pejabat publik di depan publik.

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Bila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan memiliki elemen-elemen pembentuknya. Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2003: 110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen kebijakan

tersebut sebagai kebijakan publik/*public policy*, pelaku kebijakan/*policy stakeholders*, dan lingkungan kebijakan/*policy environment*.

Gambar 2.1 Tiga Elemen Sistem Kebijakan



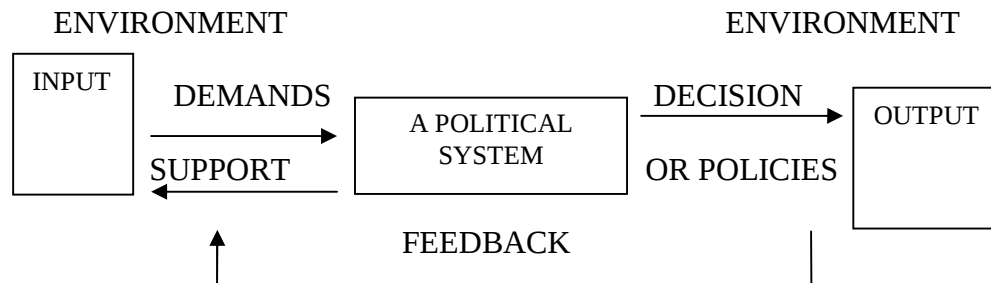
Sumber: Thomas R. Dye dalam Dunn (2003:110)

Ketiga elemen ini saling memiliki andil, dan saling mempengaruhi. Sebagai contoh, pelaku kebijakan dapat mempunyai andil dalam kebijakan, namun mereka juga dapat pula dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2003:111) menyatakan, “Oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang dialektis, yang berarti bahwa dimensi obyektif dan subyektif dari pembuat kebijakan tidak tepisahkan di dalam prakteknya”.

Jika kebijakan dapat dipandang sebagai suatu sistem, maka kebijakan juga dapat dipandang sebagai proses. Dilihat dari proses kebijakan, Riant menyebutkan bahwa teori proses kebijakan paling klasik dikemukakan oleh David Easton. David Easton dalam Riant (2008:383) menjelaskan bahwa proses kebijakan dapat dianalogikan dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Dalam terminologi ini Easton menganalogikannya dengan kehidupan sistem politik. Kebijakan publik dengan model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dalam ilmu

politik, sistem politik terdiri dari *input*, *throughput*, dan *output*, seperti digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik Menurut Easton



Sumber: David Easton dalam Riant (2008: 383)

Adapun proses terbentuknya kebijakan publik menurut Budi (2012: 35-37) melalui empat tahapan. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahap formulasi kebijakan, tahap adopsi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap formulasi kebijakan, isu/masalah publik dipastikan telah masuk agenda kebijakan untuk kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dan dirumuskan menjadi sebuah kebijakan. Tahap kedua yaitu adopsi kebijakan, adalah saat dimana semua alternatif kebijakan dikumpulkan untuk kemudian dipilih salah satu dari alternatif kebijakan tersebut. Tahap ketiga yaitu tahap implementasi kebijakan, para ahli menyebutkan tahap ini menjadi tahapan yang paling berat, dimana sebuah kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan berarti apa-apa tanpa dilaksanakan. Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan dinilai dan dievaluasi. Apakah sebuah kebijakan telah memberi dampak yang telah diinginkan atau tidak.

Sebuah kebijakan publik yang dibuat melalui tahapan yang panjang dan kompleks tentulah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan dibentuknya sebuah kebijakan publik secara umum menurut Erwan dan Dyah (2012:64) adalah

alat untuk: 1) mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat; 2) memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat; 3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat; 4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan.

Implementasi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu *implementation* yang berarti pelaksanaan. Studi implementasi kebijakan publik telah berkembang sejak lama. Studi ini bermula dari keprihatinan para ilmuwan administrasi publik pada tahun 1970-an atas kegagalan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Federal Amerika Serikat. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Solihin, 2005:-64-65) merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok/kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Sementara itu, Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Leo, 2012:8) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula terbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan (Dwiyanto, 2009:143). Selaras dengan definisi tersebut, Odoji dalam Ismail (2009:130)

menyatakan pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Riant (2006:119) yang menyatakan bahwa rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena di sini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi. Terkadang dalam praktik proses kebijakan publik, terdapat pandangan bahwa implementasi akan bisa berjalan secara otomatis setelah formulasi kebijakan berhasil dilakukan. Riant (2008: 484) menyatakan *implementation myopia* yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah “Selama ini kita anggap kalau kebijakan sudah dibuat, implementasi akan “jalan dengan sendirinya””.

Menurut Grindle (dalam Harbani, 2008: 57-58), implementasi kebijakan sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin memengaruhinya. Oleh karena itu, Grindle (dalam Solihin, 2005:59) menegaskan bahwa implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Karena kompleksitas tersebut, bukan suatu yang mengagetkan ketika banyak ahli implementasi sampai membuat kesimpulan bahwa selama ini

lebih banyak kebijakan/program pemerintah yang gagal diimplementasikan dari pada berhasil. Kenyataannya *perfect implementation* sebagaimana dikatakan Hogwood dan Gunn (dalam Erwan dan Dyah, 2012:13-16) tidak pernah terwujud karena beberapa hal yaitu:

- a. adanya hambatan kondisi eksternal,
- b. waktu dan sumberdaya tidak tersedia secara memadai,
- c. kebijakan tidak didasarkan pada landasan pemikiran (teoritis) yang kuat tentang hubungan sebab-akibat (kausalitas antara kebijakan dan hasil yang ingin dicapai,
- d. hubungan sebab-akibat antara kebijakan dan hasilnya jarang bersifat langsung,
- e. lembaga pelaksana jarang yang bisa mandiri,
- f. jarang ada kesepakatan yang bersifat umum diantara para aktor tentang tujuan kebijakan dan cara mencapainya,
- g. jarang ada suatu kondisi terjadinya komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Menurut Goggin (dalam Erwan dan Dyah, 2012:89-90), keberhasilan implementasikan kebijakan ditentukan oleh tiga hal pokok, yaitu isi kebijakan, format kebijakan, dan reputasi aktor. Isi kebijakan atau konten kebijakan merupakan bagian penting dari kebijakan publik. Isi kebijakan meliputi sumber daya, manfaat kebijakan dan keterlibatan publik. Format kebijakan terdiri dari kejelasan kebijakan, konsistensi kebijakan dan frekuensi serta penerimaan isi kebijakan. Sedangkan reputasi aktor terdiri dari legitimasi dan kredibilitas aktor-aktor pemerintah daerah. Sebuah implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila telah memenuhi tiga hal pokok di atas beserta unsur-unsur di dalamnya. Misalnya, implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila dalam penerapannya telah menggunakan sumber daya yang maksimal, bermanfaat dan menciptakan partisipasi masyarakat. Sebuah implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila diterapkan secara jelas, konsisten dan diterima oleh masyarakat. Sebuah

implementasi kebijakan dikatakan berhasil apabila aktor-aktor kebijakan mendapat legitimasi dan kredibilitas dari masyarakat.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik

Persoalan implementasi memang tidak semudah yang dibayangkan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks, melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan (Erwan dan Dyah, 2012:12). Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun juga faktor-faktor yang terkait di dalamnya.

A.G Subarsono (2005:89) menyebutkan beberapa teori implementasi kebijakan yang menyebutkan berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pakar-pakar tersebut antara lain: George C. Edwards III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, Cheema dan Rondinelli, dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining.

Perlu disadari bahwa dalam melaksanakan implementasi suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan

model-model implementasi kebijakan. Menurut George Edward III dalam Joko (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Joko (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III, komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumber Daya

Edward III dalam Joko (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Joko (2010:98) menyatakan bahwa *“probably the most essential resources in implementing policy is staff”*. Edward III menambahkan *“no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective”*

2) Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Joko (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Joko (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited*

supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Joko (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumber Daya Peralatan

Edward III dalam Joko (2010:102) menyatakan bahwa sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Joko (2010:102) menyatakan:

"Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed".

4) Sumber Daya Kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Joko (2010:103) menyatakan bahwa:

"Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan

mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”.

Oleh karena itu, Edward III menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Joko (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Joko (2010:104-105) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo (2012:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

1) Pengangkatan birokrasi.

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

2) Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Budi (2012:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Joko (2010:106) menyatakan bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Budi (2012:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi". Menurut Budi (2005:150), "*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Joko (2010:107) menyatakan bahwa demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Budi (2012:152) menjelaskan bahwa: SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat

implementasi Edward III dalam Budi (2012:155) menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Edward III dalam Joko (2010:106), mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red.) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.

C. Konsep Pedagang Kaki Lima

Sektor informal merupakan alternatif bagi masyarakat yang tidak diterima bekerja di sektor formal terutama bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak mempunyai kemampuan serta keahlian yang memadai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian” (www.kamusbesar.com, 2015).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu sektor informal yang banyak dijumpai di kota-kota besar. PKL tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kota sebagai pusat perekonomian menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mencari mata pencaharian. Oleh karena itu, masyarakat beramai-ramai datang ke kota dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, tingginya arus urbanisasi yang tidak disertai dengan perluasan lapangan pekerjaan membuat penduduk desa yang pindah ke kota mencari alternatif lain untuk tetap bertahan hidup di kota, salah satunya

adalah memilih untuk berprofesi sebagai PKL. Menurut Tri (2004:19) bahwa peranan sektor informal sangat membantu pemerintah dalam usaha menciptakan lapangan pekerjaan, terutama bagi mereka yang berpendidikan rendah, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan menambah kesejahteraan rumah tangga. Untuk dapat dikatakan sebagai salah satu usaha yang termasuk dalam usaha sektor informal, usaha tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. kegiatan usahanya tidak terorganisir secara baik karena unit usaha informal tidak mempergunakan fasilitas seperti yang tersedia bagi sektor formal,
2. pola usahanya tidak teratur, baik lokasi maupun jam kerja serta pada umumnya tidak memiliki ijin usaha.
3. tidak terkena langsung kebijaksanaan pemerintah untuk membantu ekonomi lemah,
4. mereka bermodal dari tabungan sendiri atau dari lembaga keuangan yang tidak resmi,
5. sebagian besar hasil produksi atau jasa dapat dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah serta sebagian kecil masyarakat golongan menengah.

Secara umum, di Indonesia peraturan yang mengatur tentang PKL adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Sementara itu, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam menyebutkan pedagang kaki lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal

dengan menggunakan lahan terbuka dan/atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak atau peralatan bongkar pasang sesuai waktu yang telah ditentukan.

Keberadaan PKL sebagai bagian sektor usaha informal memang sangat berperan dalam mendongkrak perekonomian masyarakat. PKL memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada berkurangnya pengangguran. Apabila dikelola dengan baik, melalui pembayaran retribusi daerah, PKL berkontribusi dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun demikian, di berbagai kota besar khususnya, profesi PKL memang sangat dilematis.

Menurut Syamsir (2009), di satu sisi menjadi pedagang kaki lima merupakan usaha untuk menggantungkan kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, sebagai aktifitas usaha yang menggunakan ruang publik, pedagang kaki lima seringkali harus berhadapan dengan peraturan daerah setempat yang pada umumnya melarang orang berjualan di tempat-tempat yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum, seperti trotoar dan badan jalan. Maka dari itu, karena perekonomian Indonesia sebagian besar didominasi oleh sektor usaha informal, penataan, pengelolaan dan pembinaan PKL menjadi bagian penting dalam usaha meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

D. Penelitian yang Relevan

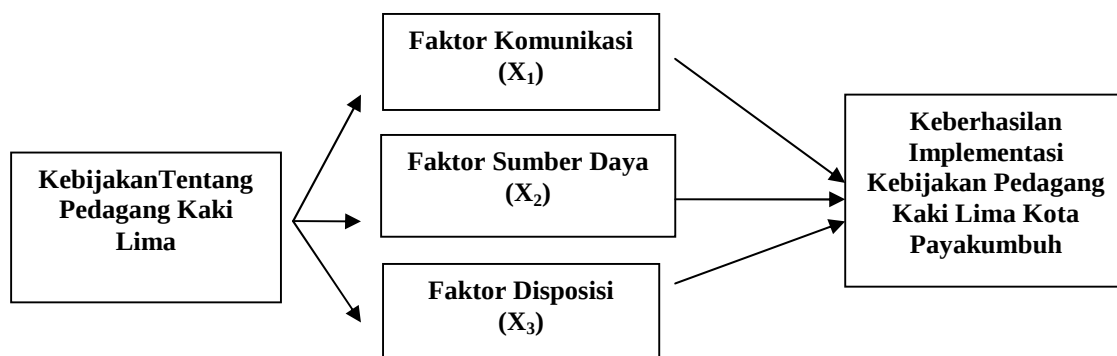
Hasil penelitian Rina Setriani. 2012. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima". Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Hasil penelitian ini menunjukkan

upaya, kendala dan solusi dalam implementasi Perda Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi Perda Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 secara deskriptif/kualitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini relevan dengan penelitian peneliti karena peneliti melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 secara kuantitatif kualitatif.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk menjelaskan seberapa besar hubungan variabel yang akan diteliti berdasarkan perumusan masalah. Pengaruh faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh, pengaruh faktor sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh, pengaruh faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual



F. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar dan mungkin salah. Hipotesis akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya.

Berpedoman pada perumusan masalah dan landasan teori yang telah dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis penelitian ini yang menjadi jawaban melalui pengumpulan informasi dan serta tes pengukuran penelitian yang dilakukan. Dengan demikian peneliti merumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

Ho₁ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Ho₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Ho₃ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh

Ho₄ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Ha₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor disposisi secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Ha₂ : Terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Ha₃ : Terdapat pengaruh yang signifikan faktor sumber daya terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

Ha₄ : Terdapat pengaruh yang signifikan faktor disposisi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian maka penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh. Berdasarkan hasil analisis pengolahan data dan pembahasan sebagai mana diuraikan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Hasil penelitian mengungkapkan apabila diuji secara bersama-sama maka diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor disposisi secara bersama-sama terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan variabel faktor komunikasi, faktor sumber daya dan faktor disposisi dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 83%. Hal ini berarti faktor komunikasi, faktor sumber daya, dan faktor disposisi mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.
2. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan terdapat pengaruh yang signifikan faktor komunikasi secara sendiri-sendiri terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan variabel faktor komunikasi dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 75%. Hal ini berarti faktor komunikasi mempunyai pengaruh

yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

3. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan terdapat pengaruh yang signifikan faktor sumber daya secara sendiri-sendiri terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan variabel faktor sumber daya dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 69.7%. Hal ini berarti faktor sumber daya mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.
4. Hasil penelitian ini juga mengungkapkan terdapat pengaruh yang signifikan faktor disposisi secara sendiri-sendiri terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan variabel faktor disposisi dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima sebesar 81.5%. Hal ini berarti faktor disposisi mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya maka melalui penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran antara lain:

1. Bagi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan agar lebih meningkatkan sosialisasi kebijakan pedagang

kaki lima Kota Payakumbuh mengingat masih banyaknya pedagang yang tidak mengetahui dan tidak memahami kebijakan tersebut.

2. Bagi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan agar lebih meningkatkan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh, khususnya sumber daya fasilitas atau peralatan dan lebih memelihara sumber daya yang telah ada.
3. Bagi Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan agar lebih memberikan sikap positif dalam pelaksanaan kebijakan pedagang kaki lima, khususnya saat berhubungan langsung dengan kelompok sasaran dalam hal ini adalah pedagang kaki lima.
4. Bagi pedagang kaki lima agar lebih memelihara sumber daya yang telah disediakan dalam implementasi kebijakan pedagang kaki lima Kota Payakumbuh baik itu berupa lokasi yang telah disediakan, papan pengumuman wastafel dan sumber daya lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Dunn, N William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Edi Suharto. 2012. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Harbani Pasolong. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Haryadi Sarjono dan Winda Julianita. 2011. *SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta: Salemba
- Inu Kencana Syafii'e. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Imam, Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Proses SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: ITS Press.
- Joko Widodo. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Jonathan Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kristian Widya Wicaksono. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Leo Agustino. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- M.Irfan Islami. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analissi Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Paham Ginting dan Syafrizal Helmi Situmorang. 2008. *Filsafat Ilmu dan Metode Riset*. Medan:USU Press.
- Riant Nugroho. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- _____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta:Elex Media Komputindo.
- Riduan dan Sunarto. 2010. *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi, dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrizal Helmi Situmorang, dkk. 2010. *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*. Medan: USU Press.
- Solihin Abdul Wahab. 2005. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara* . Jakarta:Bumi Aksara.
- Sri Suwitri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung:Alfabeta.
- _____. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Kurniadi dan Hessel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Ketertiban Umum dan Pedagang Kaki Lima di DKI Jakarta*. Yogyakarta: YPAPI.
- Wirman Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta:Erlangga.

Peraturan Perundangan

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Malam

Dokumen-dokumen

Dokumen Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Bidang Pengelolaan Pasar Kota Payakumbuh tahun 2013.

Syamsir. 2009. Dampak Program Bantuan PKL Terhadap Tingkat Motivasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Fundamental. Universitas Negeri Padang.

Wahyu Pramono. 2010. Kajian Model Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Berbasis Pedagang, Ketertiban Dan Keindahan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Andalas.

Website-website

Faisal Budimal. 16 Februari 2015. <http://www.padangtoday.com>. Relokasi Kaki Lima, Walikota Payakumbuh Bentuk Tim Penataan dan Perelokasian PKL. Diakses 17 Maret 2015.

-----, 2015. <http://www.kamusbesar.com>. Diakses 29 Januari 2015.

-----, 21 Maret 2013. <http://www.dprdpayakumbuh.com>. Pasar Payakumbuh Jadi Daya Tarik. Diakses 29 Januari 2015.